TANGGUNG GUGAT BANK DALAM HAL TERJADINYA KESALAHAN SISTEM YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SALDO NASABAH DI KARAWANG

Rani Apriani

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang 41361
Email: rani88_fhunsika@yahoo.com

Imanudin Affandi

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang
Jl. H.S. Ronggowaluyo Telukjambe Karawang 41361
Email: iman_aff@yahoo.com

ABSTRACT

Banking institutions have a quite dominant contribution in maintaining the sustainability of the economy, this cannot be separated from the role of customers as consumers of very large bank products and services. The precautionary principle must be implemented by the Bank not only because it is connected with the Bank's obligation not to harm the interests of customers who entrust their funds to the Bank, but also because of the Bank's privileged position in society. What is the Bank's liability in the event of a system error that results in a change in customer balance? The method used in this study is normative juridical. Bank liability in the event of a system error that results in changes in customer balance arises because there have been violations of several existing regulations. The bank's actions have fulfilled the elements of illegal acts so that the Bank must compensate the customer, whether requested by the customer through a lawsuit or voluntarily.

Keywords: *Liability, Bank, System Error, Balance Change*

ABSTRAK

Lembaga perbankan memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian, hal ini tidak luput dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Prinsip kehati-hatian harus dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat. Bagaimana Tanggung gugat Bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Tanggung gugat bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah timbul karena telah terjadi pelanggaran terhadap beberapa peraturan yang ada. Tindakan bank tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, sehingga sehingga Bank mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya, baik diminta oleh nasabah melalui gugatan maupun secara sukarela.

Kata Kunci: *Tanggung Gugat, Bank, Kesalahan Sistem, Perubahan Saldo*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang merupakan proses modernisasi telah membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia.

Perkembangan jaman yang semakin pesat sebagai akibat dari pembangunan banyak memberikan pengaruh dalam kemajuan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menimbulkan

permasalahan yang multi kompleks, sehingga dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan untuk terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan suatu peran serta dari berbagai sektor baik dari sektor Pemerintah maupun swasta yang senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Peran serta dari lembaga keuangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan pembangunan tersebut, yaitu dalam hal mengatur tatanan sistem ekonomi yang menunjang pelaksanaan tujuan pembangunan nasional. Lembaga keuangan pada dasarnya mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Tumbuhnya perkembangan lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa. Lembaga keuangan tersebut dapat berbentuk lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank.¹

Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wadah yang dapat menghimpun dan

menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Keberadaan lembaga perbankan saat ini memiliki kontribusi yang cukup dominan dalam menjaga keberlangsungan roda perekonomian.

Kemajuan usaha perbankan tersebut tentunya tidak luput dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangat besar. Hubungan ini sangat baik dan saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah, dengan demikian semakin banyak nasabah yang percaya terhadap bank, maka semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.

Pemerintah melalui otoritas keuangan dan perbankan, dalam hal ini Bank Indonesia berwenang menetapkan aturan dan bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha dan aktivitas perbankan. Oleh karenanya, kebijakan pemerintah disektor perbankan harus diarahkan pada upaya mewujudkan perbankan

¹ Wiwoho, Jamal, (2014, 01, 01), *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, Masalah Masalah Hukum, Jilid 43, No. 1, hlm 2.

yang sehat, kuat, dan kokoh. Pemerintah telah cukup memberikan perhatian pada penyempurnaan peraturan-peraturan hukum di bidang perbankan. Mulai dari undang-undang hingga peraturan yang bersifat teknis sudah cukup tersedia.

Bahkan peraturan yang berhubungan dengan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) sudah sangat memadai. Namun demikian kelengkapan peraturan saja tidaklah cukup untuk dijadikan ukuran bahwa perbankan nasional lepas dari segala permasalahan. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.² Prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya, bank wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.³ Asas kehati-hatian menyatakan bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat kepadanya. Tujuan lebih luas dari prinsip kehati-hatian adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem

perbankan.⁴ Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.⁵

Masing-masing bank mewujudkannya prinsip kehati-hatian dalam bentuk ketentuan standar operasional prosedur (SOP), bentuk perwujudan prinsip kehati-hatian pada masing-masing bank akan berbeda karena tidak adanya ukuran apa yang dimaksud prinsip kehati-hatian sehingga hanya berdasar dengan kebiasaan yang tetap berakar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

² Sentosa Sembiring, (2012), *Hukum Perbankan edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 313

³ Rachmadi Usman, (2001), *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 18

⁴ Permadi Gandapraja, (2004), *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 22.

⁵ Apriani, Rani, (2017, 17 09), *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum, Vol.2, No. 2, hlm 2.

Prinsip kehati-hatian itu harus dijalankan oleh Bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban Bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank, tetapi juga karena kedudukan Bank yang istimewa dalam masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari Bank itu saja.

Tidak mudah bagi bank untuk selalu memberikan pelayanan yang memuaskan untuk nasabahnya, karena dalam setiap pelayanannya, bank tidak secara keseluruhan melakukan pelayanan tanpa kesalahan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut, misalnya kesalahan dari sumber daya manusia, kesalahan produk, maupun kesalahan-kesalahan yang bersifat non-teknis. Salah satu akibat dari kesalahan system yang terjadi adalah pertambahan saldo pada rekening nasabah. Dunia perbankan saat ini, semakin disadari dalam hal pelayanan dan kepercayaan terhadap nasabah suatu kesatuan yang sulit dipisahkan dan merupakan sebuah aspek vital dalam rangka bertahan dalam bisnis untuk memenangkan persaingan.⁶

Peneliti menemukan kasus mengenai adanya pemblokiran rekening nasabah yang dilakukan oleh pihak Bank tanpa sepengetahuan nasabah. Hal ini dialami oleh nasabah yang berada di daerah Karawang. Rekening nasabah tersebut secara tiba-tiba tidak dapat dipergunakan. Kejadian tersebut bermula ketika terjadi kasus perubahan saldo yang di alami oleh beberapa nasabah yang ada di daerah Karawang. Terdapat beberapa rekening yang mengalami penambahan saldo dan terdapat pula beberapa rekening yang mengalami pengurangan saldo pada tabungannya. Nasabah yang tidak mengetahui kejadian tersebut tetap mempergunakan rekening tersebut seperti biasa, baik melakukan transaksi debit maupun penarikan tunai. Namun secara mendadak rekening nasabah tersebut tidak dapat digunakan. Hal ini terjadi pemblokiran rekening sepihak yang dilakukan Bank tanpa pemberitahuan sama sekali sehingga nasabah tidak dapat menggunakan dana yang terdapat di rekeningnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berdasarkan kasus ini dapat dilihat bahwa terjadi pelanggaran terhadap fungsi perbankan, seperti yang kita ketahui Bank merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga.

⁶ Andre Misa Putra, *Pelaksanaan Prima Terhadap Kepercayaan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jorong Kampung Tengah Pariaman*, Akademisi keuangan perbankan pembangunan padang, osf.io, diakses pada Minggu 7 Juni 2020 pukul 21.30 WIB, <http://osf.io>.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai bagaimana tanggung gugat bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah ditinjau dari Undang-Undang Perbankan? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal approach*) karena permasalahan yang diteliti ini didekati dari masyarakat selaku lembaga keuangan perbankan dan nasabah, hukum, perlindungan konsumen, s sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan berupa penelitian deskriptif yang artinya prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan objek dan subjek hukum pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

PEMBAHASAN

Bank berasal dari bahasa Italia "*banca*" yang berarti bence yaitu suatu bangku tempat duduk. Sebab, pada zaman pertengahan, pihak banker Italia memberikan pinjaman-pinjaman melakukan usahanya tersebut dengan duduk di banku-bangku di halaman pasar.⁷ Perbankan mempunyai fungsi utama sebagai intermediasi, yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya secara efektif dan efisien pada sector-sektor rill

untuk menggerakkan pembangunan dan stebilitas perekonomian sebuah Negara.⁸

Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama Perbankan Indonesia menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Hal ini berarti bahwa perbankan dituntut peranannya yang lebih aktif dalam menggali dana dari masyarakat dalam rangka pembangunan nasional.

Prinsip kehati-hatian dalam perbankan adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank tersebut. Pihak bank diharapkan selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank harus selalu konsisten untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik.⁹ Akan tetapi, terkadang terjadi pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian yang diterapkan dikarenakan adanya tindakan yang tidak sesuai dengan

⁷ A. Abdurrachman, (1991), *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradya Paramita, hlm. 80.

⁸ Rani Apriani dan Hartanto, (2019), *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta: deepublish, hlm. 1.

⁹ Hermansyah, (2013), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 7

peraturan perundang-undangan, umumnya pelanggaran tersebut adalah:

1. Pelanggaran Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan

Kewajiban bank untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa Perbankan dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

Akan tetapi baru-baru ini telah terjadi pelanggaran oleh salah satu Bank yang ada di Karawang, bank tersebut telah lalai dalam menjaga berjalannya sistem, sehingga menyebabkan perubahan saldo nasabah akibat kesalahan sistem dan berakhir dengan pemblokiran sepihak yang dilakukan oleh pihak Bank.

Seharusnya perbuatan yang dilakukan oleh pihak Bank tersebut tidak bisa terjadi, terlebih di lingkungan Bank tersebut mengingat Bank selaku institusi perbankan yang menjalankan standard pengawasan agar kegiatan perbankan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam hal bank tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maka dapat dikenakan sanksi administratif (Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan), yang berupa :

- a. Denda uang;
- b. Teguran tertulis;
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank;
- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring;
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan;
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota Koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia;
- g. Pencantuman anggota pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela dibidang perbankan

2. Pelanggaran Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank

Perubahan saldo nasabah akibat kesalahan sistem dan berakhir dengan pemblokiran sepihak yang dilakukan Bank, menurut peneliti pemblokiran hanya dapat dilakukan atas permintaan secara tertulis dari pemilik rekening, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan KPK. Pemblokiran

rekening diatur di dalam Pasal 12 ayat (1) PBI No. 2/19/2000 yang menyatakan bahwa: “Pemblokiran dan atau penyitaan simpanan atas nama seorang Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia.”

Menurut peneliti, bank berhak melakukan pemblokiran rekening nasabah apabila nasabah dinyatakan sebagai tersangka maupun terdakwa atas permintaan dari pihak yang berwenang maupun nasabah itu sendiri. Pada kasus tersebut Nasabah-nasabah bukanlah sebagai tersangka ataupun terdakwa, sehingga dalam hal ini Bank tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemblokiran rekening milik nasabah. Selain itu Nasabah tidak pernah memberikan perintah atau meminta kepada Bank Mandiri untuk melakukan pemblokiran pada rekening miliknya.

Pemblokiran terhadap rekening bank milik nasabah merupakan rahasia bank, sehingga bila Bank melakukan pemblokiran rekening milik nasabah maka Bank tersebut sudah melanggar rahasia bank dan menurut Pasal 47 UU

Perbankan dapat dijatuhi sanksi pidana bila Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

3. Pelanggaran Terhadap UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah suatu lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Agar tujuan tersebut dapat terpenuhi maka OJK mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 7 huruf c UU OJK yang menyatakan bahwa: “Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor

Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi :

- a. Manajemen risiko;
- b. Tata kelola bank;
- c. Prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
- d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan

Pada kasus ini, Bank tidak menjalankan manajemen risikonya dengan baik terutama terhadap penerapan manajemen kepatuhan. Kepatuhan sudah menjadi suatu keharusan dalam bisnis perbankan. Manajemen resiko kepatuhan merupakan sebuah resiko bank baik bank konvensional ataupun bank syariah karena tidak melakukan atau tidak mematuhi peraturan-peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan bahkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.¹⁰ Bank telah terbukti tidak patuh terhadap peraturan-peraturan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan

Transaksi Elektronik serta Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2000. Bank tidak berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan perbankan sehingga melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK berwenang mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif (Pasal 9 UU OJK). Hal ini menunjukkan bahwa Bank tersebut lemah terhadap pengawasan internnya sehingga pelanggaran tersebut dapat terjadi. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada Bank karena telah melanggar peraturan ini adalah sanksi administratif.

4. Pelanggaran Terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan suatu sistem perlindungan konsumen yang andal guna meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran pelaku usaha jasa keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Perlindungan konsumen ini penting untuk diterapkan pada semua sektor jasa

¹⁰ Diana Novita, (2019, 01, 06), Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah, *EKSISBANK*, Vol 3 No. 1 Juni 2019

keuangan terutama di lembaga perbankan. Untuk itu menurut Pasal 49 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen.”

Setiap lembaga perbankan mempunyai kebijakan dan prosedur tertulis perlindungan konsumen, agar para nasabah sebagai konsumen di lembaga perbankan dapat mempercayai bank tersebut. Kebijakan ini akan dijadikan panduan dalam seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pada kasus ini Bank tidak dapat menjalankan perlindungan konsumennya dengan baik karena Bank telah melakukan tindakan pemblokiran terhadap uang dalam rekening nasabahnya secara melawan hukum, hal ini menyebabkan nasabah mengalami kerugian. Dapat dikatakan bahwa Bank telah melanggar kebijakannya sendiri terkait dengan perlindungan konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dijatuhi sanksi administratif seperti yang diatur di dalam Pasal 53 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen yaitu :

a. Peringatan tertulis;

- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- e. Pencabutan izin kegiatan usaha

5. Pelanggaran Terhadap Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko

Dari hasil analisis peneliti, Bank tersebut telah melanggar ketentuan-ketentuan internal bank dan lemah dalam penerapan manajemen risiko. Risiko yang timbul dalam kasus ini adalah :

- a. Risiko Operasional; Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini ada dalam kasus tersebut karena adanya kesalahan manusia yang dilakukan oleh pihak Bank yang melakukan pemblokiran uang dalam rekening milik nasabahnya sehingga menimbulkan kerugian.
- b. Risiko Kepatuhan; Risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Bank Mandiri tidak menerapkan risiko kepatuhan dengan baik karena telah terbukti tidak

patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang ada antara lain Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2000.

- c. Risiko Hukum; Risiko hukum merupakan suatu risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum yang timbul dalam kasus tersebut adalah adanya tuntutan dari Nasabah yang dirugikan oleh pihak Bank yang telah melakukan pemblokiran uang dalam rekening miliknya secara melawan hukum.
- d. Risiko Reputasi; Risiko reputasi adalah suatu risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan nasabah yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pada kasus yang peneliti angkat jelas akan menimbulkan risiko reputasi karena pemblokiran yang dilakukan oleh pihak Bank secara melawan hukum akan menimbulkan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada bank, karena bank dianggap tidak bisa menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik. Bank dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar peraturan ini.

Hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan hukum secara Kontraktual, hal ini menyebabkan kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga jika salah satu pihak melakukan suatu perbuatan yang merugikan pihak yang lainnya, maka pihak tersebut harus bertanggung jawab terhadap pihak lain yang dirugikan. Bank tersebut dalam hal ini telah melakukan pemblokiran yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank. Bank yang karena kesalahannya atau kelalaiannya menyebabkan kerugian bagi nasabah dianggap telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum sehingga harus mengganti rugi, hal ini berkaitan bahwa bank tidak diperbolehkan melakukan kesalahan terhadap dana yang disimpan oleh nasabah. Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum adalah:¹¹

1. Adanya perbuatan;

Pada kasus ini jelas ada suatu perbuatan dalam arti positif yang dilakukan oleh Bank, yaitu terjadinya kesalahan sistem yang menyebabkan perubahan saldo nasabah yang kemudian ditindaklanjuti

¹¹ Purwahid Patrik, (1994), *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 78.

dengan melakukan pemblokiran uang dalam rekening nasabah.

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Unsur dari suatu perbuatan dianggap melawan hukum adalah :

- a. Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku, Bank tersebut telah melakukan pemblokiran yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2000. Selain itu Bank juga melanggar prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 29 UU Perbankan, dalam melakukan kegiatan usahanya Bank tidak berhati-hati sehingga pihaknya melakukan pemblokiran yang bertentangan dengan Pasal 12 ayat (1) PBI No.2/19/2000.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum Nasabah bank sebagai penyimpan mempunyai hak untuk dapat mengambil simpanannya tersebut kapan saja, namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena uang yang ada di dalam rekening miliknya diblokir oleh Bank mengakibatkan nasabah tidak dapat mengakses

rekeningnya tersebut, bahkan tidak dapat mengambil dan menggunakan uangnya tersebut untuk melakukan kegiatan sehari-hari.

- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; Bank dalam hal ini mempunyai kedudukan sebagai debitur terhadap dana milik nasabahnya, sehingga bank mempunyai kewajiban untuk menjaga dana tersebut dan mengelolanya dengan baik serta dapat mengembalikan dana tersebut apabila diminta oleh nasabahnya. Hal ini sesuai dengan asas kepercayaan dari perbankan yaitu nasabah dapat mempercayai bahwa dana yang disimpan di bank dapat ditarik kapan pun. Pada kasus ini, Bank tidak melakukan kewajibannya. Bank tersebut menjadi pihak yang wajib menjaga dana milik nasabahnya pada kenyataannya mengalami kesalahan sistem yang kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemblokiran terhadap dana nasabahnya tersebut sehingga nasabah tidak dapat mengambil uang miliknya
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan; Masyarakat percaya bahwa bank

akan menjaga dan mengelola uang tersebut dengan baik. Bank telah melakukan pemblokiran pada rekening milik nasabah secara melawan hukum sehingga Bank telah melanggar kepatutan yang ada di dalam masyarakat yang menganggap bank sebagai pihak yang dapat dipercaya dan selalu berhati-hati dalam melakukan kegiatan usahanya agar bisa tetap menjaga uang yang dipercayakan masyarakat kepada bank.

3. Kesalahan dari pihak pelaku;
Perbuatan yang dilakukan oleh Bank dalam melakukan pemblokiran uang dalam rekening nasabah tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu, perbuatan dapat disesalkan, dapat diduga akibatnya, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Kerugian bagi korban (nasabah)
 - a. Kerugian materiil merupakan kerugian sebesar jumlah saldo rekening nasabah dalam tabungannya.
 - b. Kerugian imateriil yaitu kerugian yang dialami oleh nasabah adalah sangat beragam, mengingat

kebutuhan dari setiap orang berbeda-beda.

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bank tersebut memblokir uang dalam rekening nasabah adalah perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian bagi nasabah, sehingga Bank Mandiri mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya. Atas kerugian yang dialami, maka nasabah menurut Pasal 30 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), nasabah sebagai pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan miliknya yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, atau untuk memperoleh ganti kerugian dari Bank sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Bank di sektor jasa keuangan. Oleh karena itu maka nasabah dapat mengajukan gugatan untuk meminta tanggung jawab Bank ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi dan memperoleh hak-haknya yang dilanggar.

KESIMPULAN

Tanggung jawab bank dalam hal terjadinya kesalahan sistem yang mengakibatkan perubahan saldo nasabah timbul karena telah terjadi

pelanggaran terhadap Pasal 2 serta Pasal 29 UU Perbankan, Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, dan Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Tindakan bank telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, sehingga Bank mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada nasabahnya, baik diminta oleh nasabah melalui gugatan maupun secara sukarela.

SARAN

Bank sebagai pelaku usaha lembaga keuangan di Indonesia harus selalu memperhatikan sistem yang digunakannya agar sistem tersebut dapat diandalkan dan terpercaya, sehingga dapat digunakan oleh nasabah sebagai konsumen agar memberikan kepuasan, kenyamanan, serta menambah kepercayaan terhadap jasa perbankan yang digunakannya. OJK sebagai pihak yang mengawasi lembaga keuangan harus dapat mengawasi lembaga keuangan agar berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Misa Putra, *Pelaksanaan Prima Terhadap Kepercayaan Nasabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Jorong Kampung Tengah Pariaman*, Akademisi keuangan perbankan pembangunan padang, <http://osf.io>, diakses pada Minggu 7 Juni 2020 pukul 21.30 WIB.
- Diana Novita, *Manajemen Risiko Kepatuhan Pada Perbankan Syariah*, EKSISBANK, Vol 3 No. 1 Juni 2019.
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan edisi Revisi*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Rani Apriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Perbankan di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Hukum DEJURE: Kajian Ilmiah Hukum, 2017.
- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, Jakarta: Pradya Paramita, 1991.
- Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, Yogyakarta: deepublish, 2019.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- <https://www.ojk.go.id> diakses hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 20.30 WIB.
- Jamal wiwoho, *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat*, MMH, Jilid 43, No. 1 Januari 2014.
- Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang 23
Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia No.11/25/PBI/2009
tentang Penerapan Manajemen Risiko

Peraturan Bank Indonesia No.2/19/PBI/2000
tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pemberian Perintah atau Izin Tertulis
Membuka Rahasia Bank

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.
01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan
Transaksi Elektronik.